



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.649029/2023**



DS:7451-9958-9859-9508

Revisi ke 02

Tanggal : 03 April 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (28) | MALUKU UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (649029) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA |
| Sebesar | : Rp. | 1.316.698.000 (SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.316.698.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN T E R N A T E | (062) Rp. | 1.316.698.000 |
|-----------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023



DS:7451-9958-9859-9508

Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

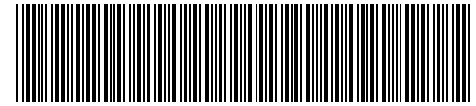
BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	132.254.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	132.254.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.184.444.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.184.444.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023

I A. INFORMASI KINERJA



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (28) MALUKU UTARA
 Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			132.254.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			132.254.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	39.719.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	39.719.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	92.535.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	92.535.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.184.444.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.184.444.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	160.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	63.032.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	96.968.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		9,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	88.726.000
Rincian Output	: 01	:	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		9,00		88.726.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	85.008.000
Rincian Output	: 01	:	BMA.001	Fasilitasi JDIHN		5,00	layanan	72.278.000
			02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	layanan	12.730.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		89,00	Orang	712.000.000
Rincian Output	: 01	:	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	89,00	Orang	712.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		13,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	138.710.000
Rincian Output	: 01	:	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	13,00	Kegiatan	138.710.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023

I B. SUMBER DANA



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (28) MALUKU UTARA
 Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	1.316.698.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.316.698.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649029	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	-	1.316.698	-	-	-	1.316.698		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	132.254	-	-	-	132.254		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	132.254	-	-	-	132.254		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	39.719	-	-	-	39.719	28 . 51	
01	RM	-	39.719	-	-	-	39.719	062	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	92.535	-	-	-	92.535	28 . 51	
01	RM	-	92.535	-	-	-	92.535	062	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.184.444	-	-	-	1.184.444		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.184.444	-	-	-	1.184.444		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	160.000	-	-	-	160.000	28 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	160.000	-	-	-	160.000	062	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	88.726	-	-	-	88.726	28 . 51	
01 RM		-	88.726	-	-	-	88.726	062	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	85.008	-	-	-	85.008	28 . 51	
01 RM		-	85.008	-	-	-	85.008	062	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	712.000	-	-	-	712.000	28 . 51	
01 RM		-	712.000	-	-	-	712.000	062	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	138.710	-	-	-	138.710	28 . 51	
01 RM		-	138.710	-	-	-	138.710	062	
JUMLAH		-	1.316.698	-	-	-	1.316.698		

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649029	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	47.597	244.573	270.678	90.691	25.160	236.506	184.570	50.512	71.196	95.215	0	1.316.698
		BELANJA BARANG	0	47.597	244.573	270.678	90.691	25.160	236.506	184.570	50.512	71.196	95.215	0	1.316.698
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	0	13.520	11.680	0	1.550	1.550	1.550	25.858	32.733	43.813	0	132.254
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	13.520	11.680	0	1.550	1.550	1.550	25.858	32.733	43.813	0	132.254
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	47.597	231.053	258.998	90.691	23.610	234.956	183.020	24.654	38.463	51.402	0	1.184.444
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	47.597	231.053	258.998	90.691	23.610	234.956	183.020	24.654	38.463	51.402	0	1.184.444

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023
IV A. B L O K I R**



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649029] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:7451-9958-9859-9508

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [649029] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001